

**FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN KAMPUNG DIMBA DISTRIK DIMBA  
KABUPATEN LANNY JAYA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Akademik  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Sosial Pada  
Program Studi Ilmu Admnistrasi Negara*



Oleh,

**TINDIEN KOGOYA  
NIM 2011 11 267**

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DI TANAH PAPUA  
CABANG KABUPATEN JAYAWIJAYA  
SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
AMAL ILMIAH YAPIS WAMENA**

**2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN****FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN KAMPUNG DIMBA DISTRIK DIMBA  
KABUPATEN LANNY JAYA**

Identitas penulis,

NAMA : TINDIEN KOGOYA

NIM : 2011-11-267

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

Telah Diperiksa Dan Di Setujui

Pada Tanggal : .....

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dra. TELLY N. SILOOY, M.Si**  
NIDN. 1207086701

**DEBORA ITLAY, SH.MH**  
NIDN.1429088401

**Mengetahui,**  
Program Studi  
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**H.MUHAMMAD ALI, S.Sos,M.Si**  
NIDN. 1417056701

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAKSI</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
1. Tujuan Penelitian .....	5
2. Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB II. LANDASAN TEORI</b> .....	6

A.	Kajian Teori .....	6
1.	Pengertian Pelaksanaan.....	6
2.	Pengertian Pembangunan .....	8
3.	Kebijakan Pemerintah .....	19
4.	Implementasi Kebijakan.....	21
5.	Konsep sumber daya manusia.....	22
B.	Definisi Operasional .....	24
C.	Kerangka Konseptual Penelitian .....	25
<b>BAB III.</b>	<b>METODE DAN TEKNIK PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A.	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	27
1.	Lokasi Penelitian .....	27
2.	Waktu Penelitian.....	27
B.	Jenis Penelitian .....	27
C.	Populasi dan Sampel .....	28
D.	Instrumen Penelitian.....	28
E.	Teknik Pengumpulan Data .....	28
F.	Teknik Analisa Data .....	29
<b>BAB IV.</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A.	Hasil Penelitian .....	43
1.	Keadaan Lokasi Penelitian.....	43
2.	Keadaan Responden.....	49
3.	Analisa Data .....	52
<b>BAB. V.</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	65
B.	Saran .....	66
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

**DAFTAR GAMBAR**

		<i>Halaman</i>
Gambar	2.1 Kerangka Konseptual Penelitian.....	37
Gambar 4.1	Struktur Organisasi .....	44

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada Hakekatnya tujuan pembangunan suatu Negara dilaksanakan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan Potensi manusia yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai.

Berbagai rencana dan program-program pembangunan sebagai wujud pelaksanaan pemerintahan telah dibuat dan diimplementasikan di setiap daerah, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Instansi-instansi vertikal di daerah, maupun pemerintah itu sendiri. Salah satu program pemerintah yaitu pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara swadaya, atau oleh lembaga-lembaga non-pemerintah lainnya yang memiliki program-program pembangunan berupa pemberdayaan masyarakat.

Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola manajerial dalam pengelolaan

pembangunan, pola manajerial tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan dan program-program pemerintahan lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu hal yang dibutuhkan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam menunjang suksesnya pelaksanaan program pembangunan. Selain itu juga diperlukan kebijaksanaan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program pembangunan.

Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Adanya partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah dalam pencapaian pelaksanaan program pembangunan tersebut.

Tujuan pembangunan oleh pemerintah memperhatikan tiga faktor yaitu (1). Upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. (2). Suatu proses perubahan kearah yang lebih baik. (3). Suatu usaha pertumbuhan dilakukan secara berencana.

Hakikat pembangunan masyarakat pada dasarnya merupakan pembangunan manusia daerah setempat seutuhnya dan sekaligus pembangunan masyarakat seluruhnya. Pembangunan sumber daya manusia menjadi tolak ukur penentu apa dan bagaimana pembangunan itu diarahkan. Sumber daya manusialah yang menetapkan, mengatur, dan mengelola kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

Pembangunan masyarakat menurut **Dr. Harry Hikmat (2004:81)**, dipandang sangat penting berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut :

1. Masyarakat yang sehat merupakan produk dari masyarakat yang aktif.
2. Proses perencanaan yang berasal dan diinginkan oleh masyarakat adalah lebih baik dibandingkan dengan perencanaan yang berasal dari penguasa
3. Proses partisipasi dalam pembangunan masyarakat merupakan pencegahan berbagai sikap masa bodoh dan individu-individu dalam masyarakat
4. Proses pemberdayaan yang kuat dalam upaya-upaya kemasyarakatan merupakan dasar kekuatan bagi masyarakat yang demokratis.

Kampung Dimba merupakan perangkat pemerintah Distrik Dimba yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Kepala Kampung dan menerima sebagian kewenangan yang diberikan oleh Kepala Distrik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta senantiasa harus memperhatikan aspirasi dan potensi yang berkembang di wilayah kerjanya dengan berprinsip kepada tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan harapan masyarakat.

Pembangunan di Kampung Dimba meliputi perbaikan jalan, jembatan, perbaikan kantor kampung, perbaikan kesehatan, dan pendidikan serta pengembangan sosial budaya. Dalam pembangunan tersebut masyarakat terlibat aktif mulai dari proses perencanaan hingga pada tahap pelaksanaan pembangunan, bahkan dana yang digunakan pada pembangunan tersebut merupakan swadaya masyarakat. Masyarakat di Kampung Dimba bergotong-royang demi menuju terciptanya pelaksanaan program pembangunan yang bertumpu pada kekuatan.

Namun kenyataanya pembangunan di kampung Dimba semenjak pemekaran Kabupaten Lanny Jaya selama  $\pm$  8 tahun ini

belum menjalani perkembangan yang signifikan dimana kehidupan masyarakat masih tergolong miskin

Pokok Permasalahan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdapat pada Kampung Dimba Distrik Dimba Kabupaten Lanny Jaya dilatar belakangi pada beberapa permasalahan-permasalahan yang perlu dilakukan secara sungguh-sungguh untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Permasalahan-permasalahan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut: *pertama*, Sarana jalan darat yang belum diaspal dan menghubungkan jalan yang bisa melintasi kendaraan antar Kampung. *Kedua*, Tempat tinggal masyarakat masih rumah-rumah tradisional dan belum mendapatkan penerangan yang layak. *Ketiga*, sarana kesehatan masih sangat minim dan hanya terdapat satu Posyandu di Kampung Dimba yang melayani masyarakat, *keempat*, sarana pendidikan hanya terdapat satu Sekolah Dasar (SD) dan satu Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini disebabkan karena kurang adanya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian melalui penelitian dengan mengangkat judul: ***“Faktor-faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Pembangunan Distrik Dimba Kabupaten Lanny Jaya.”***

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan hasil pengamatan penulis menunjukkan Faktor-faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Pembangunan Kampung Dimba Distrik Dimba Kabupaten Lanny Jaya tersebut dengan beberapa indikator yaitu :

1. Partisipasi Masyarakat
2. Partisipasi Pemerintah
3. Pemberdayaan Masyarakat

#### 4. Alokasi Dana

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut: “Faktor-faktor Apa Saja Yang Menghambat Pelaksanaan Pembangunan di Kampung Dimba Distrik Dimba Kabupaten Lanny Jaya?”

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Pembangunan di Kampung Dimba Distrik Dimba Kabupaten Lanny Jaya.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca serta sumbangan pikiran yang positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu administrasi negara berkaitan dengan Pelaksanaan Pembangunan Distrik Dimba Kabupaten Lanny Jaya Pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Amal Ilmiah ( STISIP – AI ) Yapis Wamena.

##### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran yang positif dan bahan masukan bagi Kampung Dimba Kabupaten Lanny Jaya, terutama mengenai pelaksanaan pembangunan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

##### **a. Pengertian Pelaksanaan**

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Menurut Browne dan Wildavsky.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program

yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- b. sumber daya (*Resouces*), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu :

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;

- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

## **b. Pengertian Pembangunan**

Pembangunan adalah suatu proses yang terus-menerus, dilakukan secara terencana untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek seperti ekonomi, politik, social, budaya, Pembangunan dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, teknologi, dan financial dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan masyarakat dan lingkungannya dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa bahwa pembangunan adalah pertumbuhan yang di dasarkan pada konsep kapitalis; pembangunan adalah ketergantungan antara manusia dari saat ke saat; Pembangunan adalah pemenuhan kebutuhan pokok dan penentuan keinginan; Pembangunan adalah usaha untuk mengurangi meniadakan orang miskin Pembangunan adalah wadah untuk melakukan korupsi bagi orang yang tamak.

Tujuan pembangunan yang di muat dalam buku pedoman penyusunan dan pembangunan profil Distrik (p4-D) dijelaskan bahwa tujuan pembangunan kampung atau distrik adalah meningkatkan taraf hidup mencerdaskan kesejahteraan seluruh masyarakat yang semakin merata dan adil serta mewujudkan ketahanan nasional dalam rangka meletakkan kerangka landasan yang

kuat untuk tahap pembangunan yang berikut p4-D,(1999;4).Masyarakat dikelurahan tidak saja sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subyek pembangunan dalam perencanaan pelaksanaan pengevaluasian, dan pengeyaman hasil pembangunan.

Selanjutnya definisi pembangunan menurut **Departemen Dalam Negeri (1985 : 15)**, Pembangunan adalah suatu proses yang terus menerus yang dilakukan dengan terencana untuk memperbaiki kehidupan masyarakat agar lebih baik dengan melibatkan seluruh aspek kehidupan dalam rangka pembinaan bangsa.

Berkaitan dengan definisi pembangunan menurut **Sondang P. Siagian (1982 : 3)**, pembangunan didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Apabila definisi tersebut di atas dianalisa lebih akan terlihat beberapa ide pokok yang sangat penting diperhatikan apabila seseorang berbicara tentang pembangunan.

*Pertama*, bahwa merupakan suatu proses. Proses berarti suatu kegiatan yang terus menerus dilaksanakan; meskipun sudah barang tentu bahwa proses itu dapat dibagi- dan biasanya memang dibagi- menjadi tahap-tahap tertentu yang berdiri sendiri. Pentahapan itu dapat dibuat berdasarkan jangka waktu biaya jangka waktu yang diharapkan akan diperoleh.

*Kedua*, bahwa pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan. Jika ada kegiatan yang kelihatannya nampak seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak dilaksanakan secara sadar dan timbul hanya secara insidental dimasyarakat, tidaklah dapat digolongkan kepada kategori pembangunan.

*Ketiga*, bahwa pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan.

*Keempat*, bahwa pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas disini diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka usaha peningkatan kemampuan swasembada dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain. Memang salah ciri dari masyarakat yang telah mencapai tingkat modernitas yang tinggi ialah bahwa masyarakat itu makin dapat melepaskan diri dari tekanan dan kekangan alam dan bahkan menguasai alam sekelilingnya.

*Kelima*, bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multi-dimensional. Artinya bahwa modernitas itu mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan Negara, terutama aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan administrasi.

*Keenam*, bahwa kesemua hal yang telah disebutkan dimuka ditujukan kepada usaha membina bangsa (nation building) yang terus menerus harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan Negara yang telah ditentukan sebelumnya.

Definisi Pembangunan masyarakat menurut **Harry Hikmat (2004 : 67)**, yaitu proses yang dirancang untuk menciptakan kondisi sosial-ekonominya yang lebih maju dan sehat bagi seluruh masyarakat melalui partisipasi aktif mereka, serta berdasarkan kepercayaan yang penuh terhadap mereka sendiri.

Menurut **Harry Hikmat (2004 : 67)**, pembangunan di tingkat desa bersumber pada satu pandangan bahwa perubahan-perubahan masyarakat dapat dicapai secara optimal bila ditempuh melalui partisipasi aktif yang luas dari seluruh masyarakat tingkat

paling bawah dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan-tindakan.

Sehubungan dengan hal di atas, masyarakat Indonesia tidak hanya hidup di kota melainkan juga sampai ke pelosok-pelosok atau desa-desa pedalaman sehingga perhatian secara penuh atau sebesar-besarnya perlu diberikan kepada pembangunan di kampung-kampung.

Pendapat lain tentang pembangunan Menurut **Deddy T. Tikson (2005 : 31)** mengemukakan bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan, antara lain, dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke materialisme/sekularisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional.

Berkaitan dengan hal ini pembangunan menurut **Soewigjo (1985:79)**, menguraikan pembangunan adalah pembangunan

manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan desa/kampung bersifat sektoral menyangkut semua segi kehidupan masyarakat, sehingga pembangunan desa berdiri sendiri tetapi merupakan suatu kesatuan dengan pembangunan nasional di daerah. Teori ini menggunakan istilah pembangunan Desa, namun sesuai dengan kondisi daerah khususnya bagi Propinsi Papua kata Desa diganti dengan Kampung.

Pembangunan Menurut **Peter Hagul, (1992 : 12)**, dengan memberikan definisi adalah suatu proses atau gerakan menuju kehidupan yang lebih baik di hari esok yang di rencanakan oleh bersama dan untuk masyarakat pedesaan menuju kemandirian dan modernisasi dengan sejauh mungkin memanfaatkan sumber daya lingkungan yang ada.

Pengertian pembangunan menurut **Baratha (1999 : 72)** pembangunan adalah pembangunan dari masyarakat pada unit pemerintah terendah yang harus dilaksanakan dan membina terus menerus secara sistematis dan terarah sebagai bagian penting dalam usaha pembangunan Negara sebagai usaha yang menyeluruh.

Pembangunan menurut **Mardjono (1988 : 12)** dengan memberikan definisi adalah suatu proses atau gerakan menuju kehidupan yang lebih baik di hari esok yang di rencanakan oleh bersama dan untuk masyarakat pedesaan menuju kemandirian dan modernisasi dengan sejauh mungkin memanfaatkan sumber daya lingkungan yang ada.

Pengertian pembangunan desa/kampung menurut **Jhon Clark (1995:72)**, Pembangunan Desa/Kampung adalah pembangunan dari masyarakat pada unit pemerintah terendah yang harus dilaksanakan dan dibina terus menerus secara sistematis dan terarah sebagai bagian penting dalam usaha pembangunan Negara sebagai usaha yang menyeluruh.

Selanjutnya pengertian pembangunan Desa/Kampung menurut **Kansil (1991:252)**, yaitu pembangunan yang dilaksanakan di Kampung secara menyeluruh dan terpadu, serasi antara pemerintah dan masyarakat dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakat pada setiap pembangunan yang diinginkan.

Dalam mewujudkan pembangunan Desa/Kampung yang lebih baik maka perlu difokuskan pembangunan fisik yang nyata. Dengan demikian pembangunan fisik menurut **Nugroho dan Dahuri, (2004:43)**, mengemukakan pembangunan fisik merupakan pendukung prioritas pembangunan lainnya, khususnya pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pendapat lainnya menurut **Parasuraman dalam Lupiyoadi (2001 : 6)**, pembangunan fisik adalah pembangunan sarana prasarana dasar sebagai penunjang utama dari semua aspek pembangunan lainnya.

Dalam upaya mendukung terciptanya keterpaduan dan kelestarian hasil program pembangunan yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat, maka diupayakan:

- a. Peningkatan keberdayaan masyarakat, agar seluruh warga dapat berpartisipasi aktif dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan, dengan kemampuan, kesepakatan yang proporsional.
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan program pembangunan yang ditetapkan berdasarkan kajian terhadap masalah, kebutuhan dan sumber daya yang.
- c. Mengembangkan swadaya gotong-royong masyarakat menuju terciptanya pelaksanaan program pembangunan yang bertumpu

pada kekuatan.

- d. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.

Dengan demikian, program pembangunan yang meliputi banyak aspek dan memiliki keterkaitan dengan berbagai faktor, dalam pelaksanaannya melibatkan instansi pemerintah, lembaga pemerintah non departemen dan lembaga kemasyarakatan yang dikoordinasikan secara partisipatif. Pembangunan merupakan tanggung jawab pemerintah dan juga merupakan tanggung jawab masyarakat desa yang bersangkutan, dengan demikian pembangunan yang dilaksanakan di desa harus dapat menjamin tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, maka masyarakat dilaksanakan semua aspek kehidupan yang merupakan pencerminan untuk terus menerus meningkatkan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Kesempatan yang paling nyata dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat khususnya daerah Papua adalah dengan hadirnya Otonomi Daerah.

Tujuan pembangunan menurut **Affifuddin (2010:79)**, adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, besatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Makna atau hakikat pembangunan menurut **Affifuddin (2010:43)**, mengemukakan bahwa hakikat pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh, demi mencapai kesejahteraan rakyat. Untuk bisa membangun lebih baik masyarakat harus berpendidikan dan bermoral baik.

Tujuan pembangunan mengarah pada pertumbuhan masyarakat kearah yang lebih baik. Pertumbuhan dalam **Kamus Besar Bahasa Indonesia** , mengartikan pertumbuhan merupakan hal keadaan tumbuh; perkembangan atau kemajuan. Perkembangan atau kemajuan yang dimaksudkan adalah suatu perubahan keadaan yang dahulu dengan yang berlangsung sekarang. Menurut **Affiddin (2010:43)**, mengartikan perubahan adalah mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Pemberdayaan masyarakat menurut **Rappaport (1987)** dalam **Harry Hikmat (2011:3)**, pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik dan hak-hak menurut undang-undang.

Salah satu faktor pembentuk kemampuan untuk untuk mewujudkan masa depan yang direncanakan menurut **Bryant & White (1987:24)** adalah empowerment. Empowerment masyarakat mempunyai kesempatan untuk terus mengembangkan kemampuan dan peranannya dalam merencanakan dan melaksanakan sendiri perubahan-perubahan yang mereka kehendaki untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik.

Pembangunan yang terkait dengan empowerment adalah pembangunan kampung, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan lembaga kampung secara simultan. Dengan tujuan itu pembangunan kampung dirancang untuk menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan daerah dan pembangunan nasional, selain itu pembangunan kampung juga diharapkan dapat menjadi pembangunan yang berwawasan masa depan dan berkelanjutan.

Berkaitan dengan tujuan pembangunan Kampung dilalui dengan berbagai strategi yang dilalui. Pada umumnya di negara-

negara berkembang paling tidak memiliki beberapa strategi pembangunan menurut **Abdul Wahab (1994:45)**, pada umumnya ada empat strategi yang sering dipakai oleh pemerintah yang bersangkutan dalam rangka mewujudkan tujuan yang termaktub dalam pembangunan kampung yaitu : (1) *The Growth* (strategi pertumbuhan), (2) *The Welfare Strategy* (strategi kesejahteraan) (3) *Resposip strategy* (strategi yang tanggap kebutuhan masyarakat) dan (4) *The Integreted Strategy* (strategi terpadu).

**Bintoro Tjokroamdjojo** berpendapat bahwa pembangunan adalah proses Atau usaha perubahan sosial (**1977 ; 42**) lebih jauh dijelaskan bahwa pembangunan Itu mempunyai tujuan dan rencana. Rencana itu menggambarkan pertumbuhan yang tetap dan stabil. Apakah setiap proses dan perubahan social dapat disebut sebagai pembangunan, tentu saja tidak karena hakekat masyarakat dalam suatu tempat, lingkungan atau wilayah selalu mengalami perubahan baik itu perubahan dinamis sifatnya maupun progresif ataupun lambat.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional terdapat Sembilan asas pembangunan, menurut **Ginandjar Kartasasmita (1990 ; 26)** adalah sebagai berikut :

1. Asas keimanan dan ketakwan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Asas manfaat
3. Asas demokrasi pancasila
4. Asas adil dan merata
5. Asas keseimbangan
6. Asas hokum
7. Asas kemandirian
8. Asas kejuangan dan
9. Asas ilmu pengetahuan dan teknologi

Pembangunan daerah bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan di daerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu baik antar sector maupun antar pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan oleh daerah efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan daerah diseluruh tanah air.

Berkenan dengan pandangan – pandangan mendasarkan itu dapat dilihat dari segi perencanaan pembangunan yaitu:

1. Makro
2. Sektoral,
3. Regional

Ketiga aspek perencanaan pembangunan tersebut saling berkaitan satu sama lain, oleh karena itu, untuk dapat mencapai hasil keseluruhan yang maksimal perlu di panduhkan dengan sebaik-baiknya.

Dengan berbagai pendekatan itu, pembangunan nasional / pembangunan daerah telah mencatat kemajuan yang sangat berarti, tidak ada daerah tidak maju, tanpa kecuali, namun dalam kenyataan ada perbendaan yang cukup tajam antara satu daerah dan daerah lain, segala aspek pembangunan yang di kampung kauri distrik ku-

ari dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan taraf hidup masyarakat pada segala aspek, baik mental maupun spiritual.
- b. kemajuan yang meningkatkan diri masyarakat dan pemerintah kampung dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia.
- c. Masyarakat yang tumbuh dengan suwa daya gotong royong dalam pembangunan kampung sehingga tidak terlalu tergantung sama pemerintah.

Dengan demikian maka tujuan diri yang meliputi aspek fisik dan mental dalam Menjalani adalah. agar pembangunan yang berlangsung di desa dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang meliputi aspek fisik dan mental dlm proses menjalani pembangunan dan alam sekitarnya sehingga sekali kelak masyarakat tidak mintah bantuan dari atas atau pemerintah. Menurut **Ginandjar Kartasasmita (1996 ; 393)** empat upaya besar yang satu sama lain saling berkaitan dalam pembangunan pedesaan adalah. sebagai Berikut:

- Pertama; memberdayakan ekonomi masyarakat desa dlm upaya ini diperlakukan Masukan modal dan bimbingan seperti, teknologi dan pemasaran untuk Memupukan dan memandirikan masyarakat pedesaan
- Kedua; dalam jangka yang lebih panjang, yang meningkatkan kualitas sumber Daya manusia pedesaan agar dasar yg memiliki, dasar yang memadai untuk meningkatkan memperkuat produktifitas dan daya saing.
- Ketiga; pembangunan prasarana, berbagai upaya diatas tdk cukup brmanfaat bagi Masyarakat apa bila secara mereka hidup terpencil/ tidak dapat memanfaatkan Sumber daya yang ada di wilayahnya
- Keempat; untuk mendukung berbagai upaya di atas pembangunan kelembagaan Pedesaan teramat penting juga.

Menurut **simanjuntak (1986; 163)** Mengemukakan bahwa ada tujuh asas pembangunan desa adalah sbb;

- a) Asas mufakat berarti, prioritas usaha dan kegiatan yg memberikan manfaat yang Paling banyak kampung dan warga masyarakat.
- b) Asas usaga bersama dan kekeluargaan berarti setiap usaha dan pembangunan dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat dimana setiap warga kampung menghasilkan program dan mengambil sesuai kemampuan dan keahliannya.
- c) Asas-asas demokrasi berarti setiap kegiatan usaha bersama yang bermanfaat. Asas adil dan merata berarti hasil kegiatan pembangunan harus di nikmati oleh seluruh warga desa / kampung.
- d) Asas berkehidupan dan berkeselasan berarti bahwa pembangunan harus di diarahkan pada tercapainya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan non ekonomi.
- e) Asas keserasan hukum ialah; bahwa setiap warga Negara untuk menegaskan dan menjamin kepastian hukum.
- f) Asas kepercayaan diri sendiri yaitu, pembangunan nasional harus berlandaskan kepada kepercayaan akan kemampuan dari kekuatan sendiri serta tersedia pada kepribadian bangsa.

Menurut **David C. karten dalam T.Hani Handoko, (1998;137)**

- Pertama; Pembangunan masyarakat, mengajarkan kepada penduduk pedesaan keterampilan ekonomi, sosial, dan politik.
- Kedua; Partisipasi rakyat dalam pembangunan akan lebih cepat memperantaskan Kemiskinan
- Ketiga; Desentralisasi pemerintah pusat membawa wewenang kepada pemerintah daerah tingkat baw

untuk melaksanakan program program yg di Rencanakan oleh pemerintah.

Keempat; Pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apa bila masyarakat diberi hak untuk mengelola sumber daya yang mereka miliki dan menggunakannya untuk pembangunan masyarakatnya.

## 1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi oleh banyak kalangan disamakan pengertiannya dengan keikutsertaan, turut serta mengambil bagian. Hal ini menunjukkan adanya unsure keterlibatan dari dalam suatu kegiatan. Secara Etimologi kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu : “Participation ialah kata benda orang ikut mengambil bagian, peserta, TO Participate adalah kata kerja, ikut mengambil bagian, “participation” adalah hal mengambil bagian”. (Wojowasito W.J.S. Poerwadarminto: 243)

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam partisipasi itu terkandung adanya keterlibatan diri dari seseorang atau kelompok orang.

Menurut Ach. Wazir Ws., et al. (1999: 29) partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.

Mikkelsen (1999: 64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

- 1) Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;

- 2) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
- 3) Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
- 4) Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
- 5) Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;
- 6) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

a) Pengertian masyarakat

Kata masyarakat dalam bahasa Inggris di Identikkan dengan Society (Latin) “Society” yang berarti kawan. Pengertian ini ternyata sesuai dengan kenyataan bahwa Masyarakat itu tidak daripada sekelompok manusia yang saling berhubungan dan bergaul. Berkaitan dengan pengertian tersebut Ralph Lington Kemudian menjelaskan sebagai berikut :

“Masyarakat adalah merupakan kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang telah di tentukan.”

Selanjutnya M. Cholil Mansyur memberikan batasan sebagai berikut :

“Masyarakat adalah pergaulan hidup yang akrab antara manusia, dipersekutukan dengan cara-cara tertentu oleh hasrat-hasrat kemasyarakatan merdeka.”

Defenisi menunjukkan bahwa dalam hidup bermasyarakat manusia selalu diatur oleh adanya cara-cara tertentu yang merupakan aturan. Manusia dalam kehidupannya selalu membutuhkan manusia lain, karena tidak semua kebutuhan hidupnya dapat dipenuhi sendiri begitupun sebaliknya pada orang lain. Saling ketergantungan ini menimbulkan interaksi sosial.

Interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat diketahuimelalui adanya kontak sosial (Social Contact) dan komunikasi yang terjadi di antara masyarakat. Adanya kontak sosial dan komunikasi itu sehingga masyarakat selalu kelihatan hidup penuh dengan kebersamaan.

Partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah, mencari pemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan (Panudju, 1999:71).

Menurut Conyers (1994:154), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa merekapun mempunyai hak untuk turut memberikan saran

dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini selaras dengan konsep man-centred development (suatu pembangunan yang dipusatkan pada kepentingan manusia), yaitu jenis pembangunan yang lebih diarahkan demi perbaikan nasib manusia dan tidak sekedar sebagai alat pembangunan itu sendiri.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur yang sungguh penting dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan dasar pandang demikian, maka pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pematapan, pembudayaan, dan pengamalan demokrasi (Kartasasmita, 1996:145).

Menurut Siahaan (2002:4), partisipasi masyarakat memiliki keuntungan sosial, politik, planning dan keuntungan lainnya, yaitu:

- 1.) Dari pandangan sosial, keuntungan utamanya adalah untuk mengaktifkan populasi perkotaan yang cenderung individualistik, tidak punya komitmen dan dalam kasus yang ekstrim teralienasi.
- 2.) Dari segi politik, partisipasi lebih mempromosikan participatory dibanding demokrasi perwakilan (representative democracy) sebagai hak demokrasi dari setiap orang dan dengan demikian publik secara umum, untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
- 3.) Dari segi planning, partisipasi menyediakan sebuah forum untuk saling tukar gagasan dan prioritas, penilaian akan public interest dalam dinamikanya serta diterimanya proposal-proposal perencanaan.

Partisipasi masyarakat di Kampung Dimba Distrik Dimba Kabupaten Lanny Jaya memiliki banyak bentuk, mulai dari yang

berupa keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung, seperti berupa sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Sejauh ini, partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan tapi juga mulai tahapan perencanaan bahkan pengambilan keputusan.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi masyarakat desa tidak terlepas dari partisipasi aktif anggota masyarakat. Di desa telah dibentuk pemerintah desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wujud dari demokrasi yang berfungsi sebagai lembaga legislatif desa.

Secara historis desa merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum Negara dan pemerintahan ini terbentuk, etnisitas sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya, telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting. Mereka ini merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat sitiadat dan hukumnya sendiri yang mengakar kuat,

Adanya kebijakan otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi yang berkembang pada masyarakat. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam seluruh proses kebijakan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengawasan.

Untuk mewujudkan kegiatan pembangunan yang berada di Kampung Dimba Kabupaten Lanny Jaya yang lebih demokratis sebagai upaya dalam mendukung berjalannya roda pemerintahan,

pemerintah pusat telah memberikan wewenang kepada daerah untuk lebih menentukan nasib pembangunan daerah itu sendiri melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Maksud dan tujuan Undang-Undang tersebut adalah menciptakan pemerataan pembangunan nasional dalam mengatasi kesenjangan antar daerah, karena dengan pembangunan daerah itulah yang akan dapat menjangkau pelosok negeri.

## **2. Partisipasi Pemerintah**

Dalam pemerintah daerah Kabupaten/Kota di bentuk pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa (SEKDES) dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa dengan memperhatikan asal usul dan prakarsa masyarakat. Desa di kabupaten secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa pemerintah desa bersama BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA).

Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan, hukum adat istiadat setempat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat dengan BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota

BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh dan pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Adapun wewenang BPD yaitu membahas rancangan peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia

pemilihan kepala desa, menggali menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan menyusun tata tertib BPD. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai hak, meminta keterangan kepada pemerintah desa, menyatakan pendapat. Anggota BPD mempunyai kewajiban mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, memproses pemilihan kepala desa, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, dan menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga masyarakat.

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintah desa, menurut Nurcholis (2005:138) pemerintah mempunyai tugas pokok:

- 1.) Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.

2.) Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten

Dari tugas pokok tersebut lahir fungsi pemerintah desa yang berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi pemerintah desa merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu didalam situasi sosial suatu kelompok masyarakat (Rivai, 2004:53)

Adapun fungsi pemerintah desa secara operasional dapat dibedakan dalam fungsi pokok, yaitu sebagai berikut:

a) Fungsi Instruktif

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemerintah sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan dimana pemerintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif.

b) Fungsi Konsultatif

Fungsi ini digunakan sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan sebagai usaha untuk menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin perlu konsultasi dengan masyarakat-masyarakat yang di pimpinnya.

c) Fungsi Partisipasi

Dalam menjalankan fungsi ini pemerintah desa berusaha mengaktifkan masyarakatnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain.

d) Fungsi Delegasi

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan baik melalui persetujuan maupun tanpa

persetujuan pemerintah. Fungsi delegasi ini pada dasarnya berarti kepercayaan.

e) Fungsi Pengendalian

Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengantar aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam. Koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian pemimpin dapat mewujudkannya melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi dan pengawasan.

Berdasarkan pasal 14 dan 15 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 bahwa pemerintah desa mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. *Pertama*, urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa. *Kedua*, urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa. *Ketiga*, urusan kemasyarakatan ialah pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas kepala desa mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan rancangan pengaturan desa
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD

- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat desa
- f. Membina perekonomian desa
- g. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif
- h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengendalian dan dapat menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seluruh fungsi pemerintah tersebut dilaksanakan atau diselenggarakan dalam aktivitas pemerintah secara integral.

Pelaksanaan berlangsung sebagai berikut:

- a. Pemerintah desa berkewajiban manjabarkan program kerja
- b. Pemerintah desa harus berusaha mengembangkan kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat
- c. Pemerintah desa harus berusaha memberikan petunjuk yang jelas
- d. Pemerintah desa harus mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan masalah sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing
- e. Pemerintah desa harus mampu mengembangkan kerjasama yang harmonis
- f. Pemerintah desa harus mampu menumbuh dan mengembangkan kemampuan memiliki tanggung jawab
- g. Pemerintah desa harus mampu mendayagunakan pengawasan sebagai alat pengendali

### **3. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi, sekarang telah banyak diterima, bahkan telah berkembang dalam berbagai literatur di dunia barat. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pembangunan Sosial di Kopenhagen tahun 1992 juga telah memuatnya dalam berbagai

kesepakatannya. Namun, upaya mewujudkannya dalam praktik pembangunan tidak selalu berjalan mulus.

Banyak pemikir dan praktisi yang belum memahami dan mungkin tidak meyakini bahwa konsep pemberdayaan merupakan alternatif pemecahan terhadap dilema-dilema pembangunan yang dihadapi. Mereka yang berpegang pada teori-teori pembangunan model lama juga tidak mudah untuk menyesuaikan diri dengan pandangan-pandangan dan tuntutan-tuntutan keadilan. Mereka yang tidak nyaman terhadap konsep partisipasi dan demokrasi dalam pembangunan tidak akan merasa tentram dengan konsep pemberdayaan ini. Lebih lanjut, disadari pula adanya berbagai bias terhadap pemberdayaan masyarakat sebagai suatu paradigma baru pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “partisipasi (*participatory*), pemberdayaan (*empowering*), dan berkelanjutan (*sustainable*)” Chambers, dalam Kartasasmita, 1996:3.

Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan dimasa yang lalu.

Lahirnya konsep pemberdayaan sebagai antitesa terhadap model pembangunan yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut: (1) bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi; (2) pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran; (3) kekuasaan akan membangun bangunan atas atau system pengetahuan, sistem

politik, sistem hukum dan sistem ideologi yang manipulative untuk memperkuat legitimasi; dan (4) pelaksanaan sistem pengetahuan, system politik, sistem hukum dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya (Priyono dan Pranarka, 1996:6). Akhirnya yang terjadi ialah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang lemah (*empowerment of the powerless*).

Alur pikir di atas sejalan dengan terminologi pemberdayaan itu sendiri atau yang dikenal dengan istilah *empowerment* yang berawal dari kata daya (*power*). Daya dalam arti kekuatan yang berasal dari dalam tetapi dapat diperkuat dengan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar. Ia merupakan sebuah konsep untuk

memotong lingkaran setan yang menghubungkan power dengan pembagian kesejahteraan. Keterbelakangan dan kemiskinan yang muncul dalam proses pembangunan disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam pemilikan atau akses pada sumber-sumber power. Proses historis yang panjang menyebabkan terjadinya *power dis powerment*, yakni peniadaan power pada sebagian besar masyarakat, akibatnya masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap akses produktif yang umumnya dikuasai oleh mereka yang memiliki power. Pada gilirannya keterbelakangan secara ekonomi menyebabkan mereka makin jauh dari kekuasaan. Begitulah lingkaran setan itu berputar terus. Oleh karena itu, pemberdayaan bertujuan dua arah. Pertama, melepaskan belenggu kemiskinan, dan keterbelakangan. Kedua, memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur ekonomi dan kekuasaan.

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari

perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Menurut Priyono dan Pranarka (1996:6), dalam konsep pemberdayaan, manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Menurut Sumodiningrat (1999:2), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Mubyarto (1998:1) menekankan bahwa terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia (di pedesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan system pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat.

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi.

Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat itu sendiri menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik disebut sebagai ketahanan nasional. Artinya bahwa apabila masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, maka hal tersebut merupakan bagian dari ketahanan ekonomi nasional.

Dalam kerangka pikir inilah upaya memberdayakan masyarakat pertama-tama haruslah dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya (Kartasmita, 1996:5).

Dengan demikian, pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungtanggapan dan lain-lain yang merupakan bagian pokok dari upaya pemberdayaan itu sendiri.

Pemberdayaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pemberdayaan sektor informal, khususnya kelompok pedagang kaki lima sebagai bagian dari masyarakat yang membutuhkan penanganan/pengelolaan tersendiri dari pihak pemerintah yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya yang mereka miliki yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan pendapatan/profit usaha sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan daerah dari sektor retribusi daerah.

#### **4. Alokasi Dana**

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Desa untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Rumus yang digunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:

- 1.) Asas Merata, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
- 2.) Asas Adil, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP). Besarnya prosentase perbandingan antara asas merata dan adil adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Untuk memaksimalkan pengelolaan ADD yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa, maka ADD memiliki tujuan antara lain (Hanif Nurcholis, 2011; 89):

- a. Menaggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

## **B. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional merupakan suatu defenisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti, menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (Nazir, 1983:192).

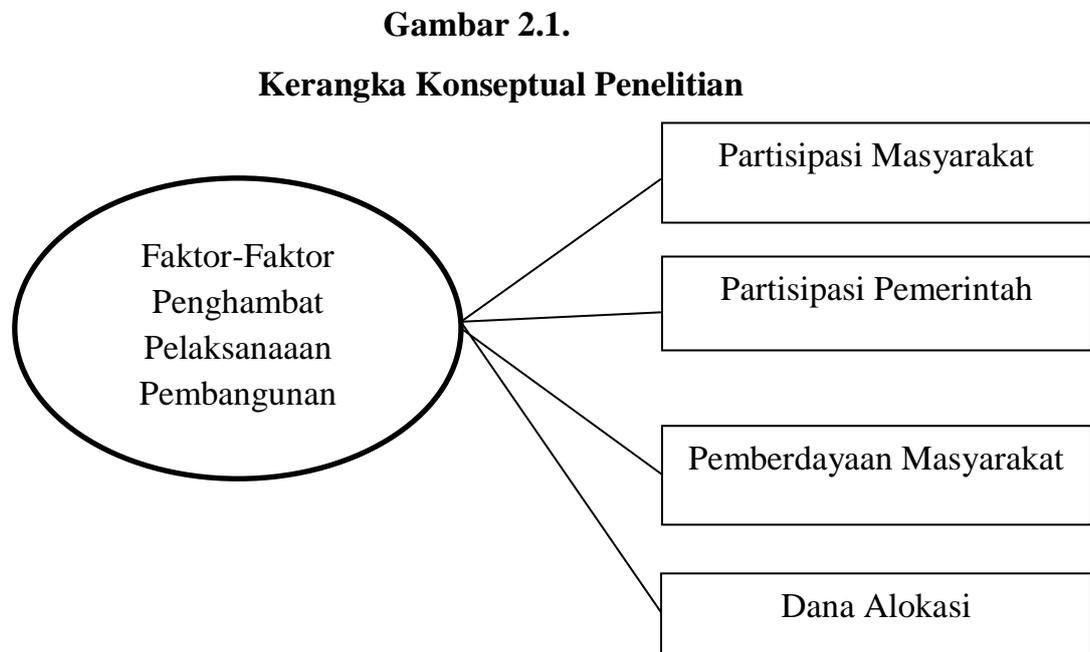
Defenisi operasional penelitian ini adalah :

Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Pembangunan adalah factor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan pembangunan kampung tidak berjalan dengan Baik. Adapun indikatornya digunakan.

- a. Partisipasi Masyarakat adalah Keikutsertaan masyarakat untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri.
- b. Partisipasi Pemerintah adalah peran pemerintah dalam mengerakan masyarakat dan melibatkan mereka dalam meningkatkan pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreatifitasnya guna menunjang pembangunan yang lebih merata.
- c. Pemberdayaan Masyarakat adalah kemampuan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan usaha untuk memperbaiki kesejahteraannya.
- d. Alokasi Dana ketersediaan Dana untuk membiayai program-program yang dilakukan dikampung.

### C. Kerangka Konseptual

Adapun Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1. di bawah ini.



Pada gambar 2.1 kerangka konseptual penelitian di atas, maka dapat dilihat adalah Faktor-faktor Penghambatan Pelaksanaan Pembangunan Kampung Dimba Distrik Dimba Kabupaten Lanny Jaya. yaitu (1) Partisipasi Masyarakat, (2) Partisipasi Pemerintah, (3). Pemberdayaan Masyarakat (4). Dana Alokasi.

## **BAB III**

### **METODE DAN TEKNIK PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Kampung Dimba Distrik Dimba Kabupaten Lanny Jaya. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan mudah dijangkau sehingga dapat menghemat waktu, tenaga serta dana.

##### **2. Waktu Penelitian**

Adapun waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini kurang lebih selama 2 (dua) bulan.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah menggunakan penelitian deskriptif, menurut **Sugiyono (2011:11)** penelitian deskriptif, adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.

#### **C. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Menurut Sugiyono (2007:150) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi menurut Sarwono (2006:220), adalah seluruh penduduk yang dimasukkan untuk diteliti disebut populasi yang paling sedikit mempunyai sikap yang sama. Dari pengertian tersebut maka yang

menjadi populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat pada Kampung Dimba sebanyak 350 KK.

## 2. Sampel

Menurut Surakhmad (1986:102) mengemukakan bahwa sampel adalah “penarikan sebagian populasi untuk mewakili keseluruhan populasi menjadi sampel. Teknik penarikan sampel yang penulis gunakan adalah rumus Slovin.

Slovin digunakan dalam penentuan jumlah sampel jika jumlah populasinya relative besar/banyak. Dengan menggunakan Slovin memungkinkan jumlah sampel lebih memungkinkan untuk diteliti. Sampelnya dengan teknik rondam atau acak dan tersebar ada pada seluruh warga masyarakat. Jika terdapat koma maka hasilnya dibulatkan keatas sehingga sampelnya lebih aman dari pada kurang. Adapaun Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

Dimana :

- n = Jumlah Sampel
- N = Jumlah Populasi
- D = derajat Kebebasan, ( Jonathan Sarwono, 2006;120)

Jadi, N =350.

$$n = \frac{350}{350 (0,1)^2 + 1}$$

$$n = 77,8 \sim 78 \text{ (pembulatan)}$$

Dengan demikian besarnya sampel sebanyak 78 KK.

#### **D. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen untuk mengukur variabel partisipasi masyarakat.

Adapun kategori-kategori instrument penelitian yang dapat digunakan Skala Likert. Menurut Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah (110:2005), Skala Likert berisi pernyataan yang sistematis untuk menunjukkan sikap seorang responden terhadap pernyataan itu. Indeks ini mengasumsikan bahwa masing-masing Kategori Jawaban ini memiliki intensitas yang sama. Keunggulan indeks ini adalah kategorinya memiliki urutan yang jelas mulai dari “sangat baik”, “baik”, “cukup baik”, “kurang baik”, “sangat tidak baik”.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian Pustaka (liberary research), Penelitian pustaka yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui perpustakaan, baik berupa buku-buku literature, diklat-diklat, bahan kuliah, peraturan-peraturan dan sebagainya yang memuat keterangan tentang masalah yang dibutuhkan dalam pembahasan ini.
2. Penelitian lapangan (field research), Penelitian lapangan yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung ke lapangan atau memperoleh data secara langsung terhadap subjek yang diteliti yaitu Kampung Dimba Distrik Dimab Kabupaten Lanny Jaya dengan cara-cara sebagai berikut:
  - a. Pengamatan (obsevasi), Soetrisno dalam Sugiyono (2008:166) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Atau dapat dikatakan bahwa pengamatan dan pencatatan fenomena-fenomena yang tampak

- pada obyek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat atau peristiwa, keadaan dan situasi yang sedang terjadi. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati (responden).
- b. Wawancara (interview), merupakan komunikasi atau pembicaraan dua arah yang dilakukan oleh pewawancara (peneliti) dan responden untuk menggali informasi yang relevan dengan tujuan penelitian Sumarni Wahyu (2006 : 85). Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dalam bentuk fakta, opini sehingga akan memperoleh data yang lengkap.
  - c. Menurut Sugiyono (2008:162), angket (kuesioner), merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan lisan atau pertanyaan tertulis dalam bentuk pilihan ganda kepada responden untuk dijawabnya.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Menurut Hasan (2006:24), analisa data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus tertentu. Teknik analisa data deskriptif dapat menggunakan skor (skala ordinal), persentase (skala nominal), nilai rata-rata (mean), data yang sering muncul (modus), nilai tengah data (mendian) dan analisa data deskriptif lain yang memiliki sumber (referensi) yang dapat dipercaya secara ilmiah.

Tabel penolong untuk menentukan predikat dari 5 (lima) kategori untuk sampel 60 responden :

Jumlah skor ideal (skor maksimum)	: 5 x 78 : 390
Jumlah skor terendah (skor minimum)	: 1 x 78 : 78

**Tabel interpretasi nilai skor**

<b>No</b>	<b>Interval jumlah skor</b>	<b>Predikat</b>
1	$312 < s/d \leq 390$	Sangat baik
2	$234 < s/d \leq 312$	Baik
3	$156 < s/d \leq 234$	Kurang baik
4	$78 < s/d \leq 156$	Tidak baik
5	$0 < s/d \leq 78$	Sangat tidak baik

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Hasil Penelitian**

##### **a. keadaan Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah**

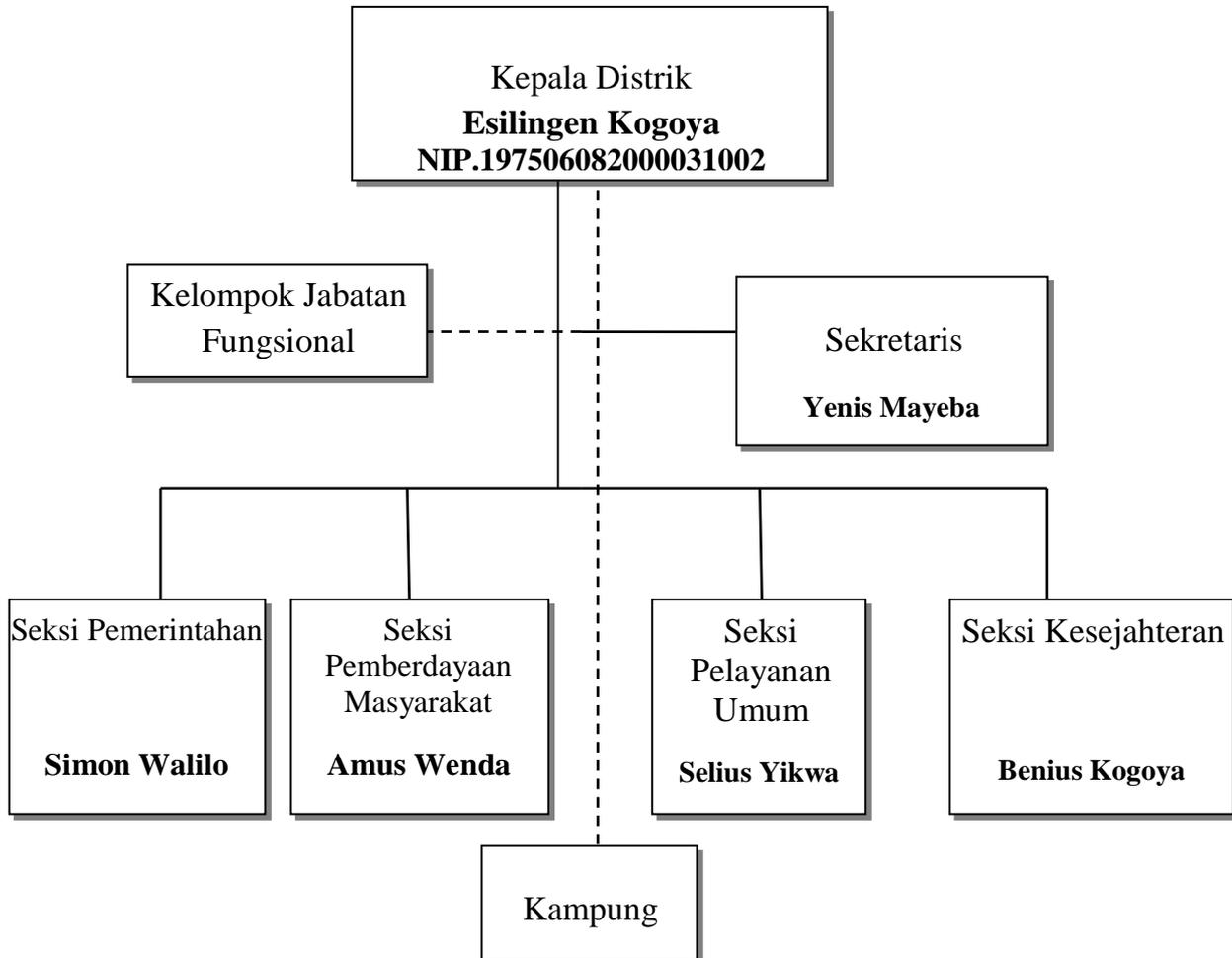
Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya terdiri atas 10 (sepuluh) distrik, yaitu Distrik Tiom, Distrik Pirime, Distrik Makki, Distrik Gamelia, Distrik Dimba, Distrik Tiomneri, Distrik Melagneri, Distrik Balingga, Distrik Kuyawage dan Distrik Poga. Kabupaten Lanny Jaya memiliki luas wilayah keseluruhan  $\pm 2.248$  km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 89.332 jiwa.

Dengan terbentuknya Kabupaten Lanny Jaya sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lanny Jaya.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Lanny Jaya perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2. Struktur Organisasi

### Struktur Organisasi Distrik Dimba



*Sumber Data: Kantor Distrik Dimba, Tahun 2017*

### 3. Tugas dan Fungsi

Organisasi Sekretariat Kantor Distrik Dimba yaitu sebagai berikut:

#### 1) Kepala Distrik

Kepala Distrik selaku kepala wilayah dan sebagai penguasa tunggal di wilayahnya, bekedudukan sebagai:

- a) Kepala wilayah yang memimpin penyelenggaraan pemerintah ditingkat Distrik yang dibawa dan bertanggung jawab kepada bupati, yang dalam hal ini Kepala Distrik Dimba bertanggung jawab kepada Bupati Lanny Jaya.
- b) Menjalankan tugasnya Distrik Dimba mengadakan koordiansi dengan instansi-instansi lainnya.

Secara umum Kepala Distrik mempunyai tugas meletakkan pelaksanaan serta penyelenggaraan segala urusan pemerintahan, dan secara terperinci diuraikan sebagai berikut:

- a) Membina ketentraman dan ketertiban di distrik sesuai dengan kebijaksanaan ketentraman dan ketertiban yang ditetapkan pemerinyahan secara langsung.
- b) Melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang pembinaan idiologi negara serta pembinaan kesatuan bangsa sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan di distrik.
- c) Menyelenggarakan koordinasi ats kegiatan-kegiatan instansi-istansi vertikal, dinas-dinas daerah, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan untuk mencapai daya guna dan basil guna yang sebesar-besarnya.
- d) Membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di distrik.
- e) Melaksanakan segala tugas pemerintah yang tidak termasuk dalam tugas sesuai instansi lainnya (tugas pembantu) di distrik.

## 2) Sekretariat Distrik

Sekretariat Distrik Dimba adalah unsur staf yang langsung berada di bawah Kepala Distrik dalam melaksanakan segala unsur pemerintahan, kesejahteraan rakyat, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat khususnya mengenai masalah administrasi umum pada tingkat distrik.

Sekretariat Distrik dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawa dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Distrik, khususnya dalam melaksanakan tugas pembinaan administratif kepada seluruh perangkat pemerintah pada distrik untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sekretariat berfungsi sebagai berikut:

- a) Melaksanakan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat pemerintah distrik dalam rangka penyelenggaraan administrasi yang terpadu.
- b) Melakukan pembinaan dalam pengumpulan data, analisis data, merumuskan program dan petunjuk, serta memonitor perkembangan penyelenggaraan administrasi pemerintahan pada Distrik Dimba Kabupaten Lanny Jaya.
- c) Melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang sosial politik, memberikan pembinaan dan kerja sama dengan aparat pemerintah lainnya dalam rangka memelihara stabilitas politik.
- d) Melakukan pembinaan dalam rangka mensejahterakan masyarakat pada Distrik Dimba Kabupaten Lanny Jaya.
- e) Melakukan pembinaan penyelenggaraan pembangunan dan memonitor perkembangan pembangunan.
- f) Melakukan pembinaan penyelenggaraan pembangunan kampung dalam arti memberikan bimbingan teknis penyusunan data dengan kegiatan, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa

(LKMD), serta meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat, dan penyuluhan pembangunan desa.

### 3) Unsur Pemerintahan

Tugas unsur pemerintahan antara lain yaitu sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan, mensistematisasikan dan menganalisa data dibidang pemerintahan, sosial politik, ketertiban dan ketentraman.
- b) Menyusun program penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan politik dalam negeri, pembinaan ideologi negara, pembinaan kewarganegaraan serta ketentraman dan ketertiban umum.
- c) Melakukan pengendalian pengendalian pengevaluasian terhadap penyelengaran pemerintahan umum.
- d) Mempersiapkan pencalonan serta pemberentian kepala kampung beserta perangkatnya, serat meberikan bimbingan dan petunjuk serta mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala kampung .
- e) Melakukan dan membina pelaksanaan administrasi kependudukan dan catatan sipil serta serta melakukan pembinaan administrasi kampung.
- f) Pembinaan transmigrasi, ketenagakerjaan, imigrasi, urbanisasi, pertahanan serta lingkungan hidup.

### 4) Unsur Kemasyarakatan

Tugas Unsur Kemasyarakatan antara lain yaitu sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan, mensistemtisasikan, menganalisa, penyusunan program, evaluasi terhadap pembinaan kesejahteraan masyarakat.
- b) Mengadakan pembinaan terhadap penderita cacat, tuna karya tuna wisma, panti asuhan dan sejenisnya.
- c) Mengadakan pencegahan, penanggulangan dan pertolongan bencana alam.

- d) Mengadakan pembinaan terhadap usaha sosial, pasar, pertunjukan-pertunjukan dan sejenisnya.
- e) Mengadakan pembinaan terhadap umat beragama, pendidikan kemasyarakatan, kesehatan masyarakat, generasi muda, kebudayaan dan kesenian, peranan wanita dan olahraga.
- f) Mengadakan pembinaan kebersihan hidup dan kelestarian alam serta perburuan.

#### 5) Unsur Pembangunan

Tugas unsur pembangunan antara lain yaitu sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan, mensistematisasikan, menganalisa data pembangunan kampung dan pembangunan pada umumnya.
- b) Meyusun program-program pembangunan kampung dan pengendalian serta evaluasi hasil pembangunan kampung secara umum.
- c) Melaksanakan pendidikan dan latihan keterampilan bagi masyarakat kampung.
- d) Mengadakan pembinaan LKMD dan PKK serta penyelenggaraan lomba kampung.
- e) Melakukan kegiatan dalam rangka koodinasi perencanaan pembangunan UDKP di distrik.
- f) Melakukan pembinaan pembangunan prasarana dan sarana kampung dan pembangunan perekonomian kampung.
- g) Melakukan koodinasi dalam mensukseskan program-program bimas, penghijauan listrik masuk kampung dan TNI masuk kampung.

#### 6) Unsur Pelayanan Umum

Tugas unsur pelayanan umum antara lain yaitu sebagai berikut:

- a) Mempersiapkan naskah laporan pemerintahan distrik.
- b) Melakukan urusan tata usaha umum Kantor Distrik.

- c) Mempersiapkan dan melaksanakan administrasi kepegawaiaan sekretariat distrik.
- d) Mempersiapkan dan melaksanakan administrasi keuangan dalam rakyat penyelenggaraan distrik serta kesejahteraan pegawai.
- e) Merencanakan, mengadakan, memelihara dan mendistribusikan alat-alat perlengkapan/invenstaris kantor.
- f) Mempersiapkan rapat-rapat, upacara-upacara resmi, penerimaan tamu, perjalanan dinas pegawai (Kepala Distrik).

## b. Keadaan Responden

**Tabel 4.1**

**Keadaan Responden berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>NO</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
1.	Laki-laki	49	62,82
2.	Perempuan	29	37,17
<b>Jumlah</b>		<b>78</b>	<b>100</b>

**Sumber Data : Olahan Dari Data Primer, 2017**

Dari tabel 4.1 terlihat bahwa keadaan responden Kepala Distrik Dimba Kabupaten Lanny Jaya berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah laki-laki 49 orang atau (62,82%) jumlah perempuan 29 orang atau (37,17%).

**Tabel 4.2**

**Keadaan Responden berdasarkan Usia**

<b>No</b>	<b>Umur (Tahun)</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1.	30-39 Tahun	42	53,84
2.	40-55 Tahun	36	46,15
<b>Jumlah</b>		<b>78</b>	<b>100</b>

**Sumber Data : Olahan Dari Data Primer, 2017**

Data tabel 4.3 dilihat bahwa jumlah responden pada Distrik Dimba Kabupaten Lanny Jaya sebanyak 30 orang, dan rata-rata

Usia 30-39 berjumlah 42 orang atau (53,84%), dan Usia 40-55 berjumlah 36 orang atau (46,15%).

**Tabel 4.3**

**Keadaan Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	SI	2	6,6
2.	D III	6	7,69
3.	SMA/Sederajat	70	89,74
<b>Jumlah</b>		<b>78</b>	<b>100</b>

**Sumber Data: Olahan Dari Data Primer, 2017**

Dari tabel 4.3 dilihat bahwa keadaan responden yang tingkat pendidikan Sarjana (SI) sebanyak 2 orang atau (6,6%), pegawai dengan tingkat pendidikan Diploma DIII, sebanyak 6 orang atau (7,69%), responden dengan tingkat pendidikan SMA/Sederajat sebanyak 70 orang atau (89,74%).

#### **4. Keadaan Sarana dan Prasarana**

Kantor Distrik Dimba Kabupaten Lanny Jaya, memiliki sarana dan prasarana pendukung sebagai Inventaris Kantor. Untuk lebih jelasnya penulis mengklasifikasikan dalam tabel berikut dengan kondisi fisiknya saat melakukan pemantauan adalah sebagai berikut:

**Tabel.4.4**  
**Sarana dan Prasarana Pembangunan**  
**Kabupaten Lanny Jaya**

<b>NO</b>	<b>Sarana dan Prasarana</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Jalan	Baik
2.	Jembatan	Baik
3.	Transportasi	Baik
4.	Puskesmas	Baik
5.	Pasar	Baik
6	Sekolah	Baik

**Sumber Data: Kantor Distrik Dimba, 2017**

### **c. Analisa Data**

#### **1. Hasil Penelitian**

Sebagaimana hasil penelitian yang telah penulis lakukan serta data yang telah diolah, maka data – data variabel factor – factor penghambat pelaksanaan pembangunan dikampung Dimba Distrik Dimba Kabupaten Lanny Jaya beserta indikator – indikator dapat didiskripsi dalam tabel – tabel selanjutnya

Untuk melihat mengetahui Faktor – faktor penghambat pelaksanaan pembangunan kampung maka telah diperoleh data hasil penelitian lapangan berdasarkan alat ukur tiap – tiap item pada indikaor – indikator dari variabel Faktor – faktor penghambat pelaksanaan pembangunan kampung dalam tabel – tabel berikut.

#### **a. Partisipasi masyarakat**

Untuk mengetahui frekuensi tanggapan responden terhadap indikator partisipasi masyarakat, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5  
**Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kampung**

<b>Kategori Jawaban</b>	<b>Skor</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Jumlah Skor</b>
Sangat Baik	5	27	135
Baik	4	10	40
Kurang Baik	3	20	60
Tidak Baik	2	15	30
Sangat Tidak Baik	1	6	6
<b>Jumlah</b>		<b>78</b>	<b>271</b>

*Sumber Data* : Pengolahan data Primer, 2017

Dari tabel 4.5 diatas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap pernyataan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kampung tanggapan responden didapatkan jumlah skor 271 dengan predikat baik.

Tabel 4.6  
**Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dalam pelaksanaan pembangunan kampung**

<b>Kategori Jawaban</b>	<b>Skor</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Jumlah Skor</b>
Sangat Baik	5	35	175
Baik	4	20	80
Kurang Baik	3	9	27
Tidak Baik	2	10	20
Sangat Tidak Baik	1	4	4
<b>Jumlah</b>		<b>78</b>	<b>306</b>

*Sumber Data* : Pengolahan data Primer, 2017

Dari tabel 4.6 diatas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dalam pelaksanaan pembangunan kampung tanggapan responden didapatkan jumlah skor 306 dengan predikat baik.

Tabel 4.7  
**Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa  
 dalam proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan  
 pembangunan**

<b>Kategori Jawaban</b>	<b>Skor</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Jumlah Skor</b>
Sangat Baik	5	29	145
Baik	4	21	84
Kurang Baik	3	10	30
Tidak Baik	2	11	22
Sangat Tidak Baik	1	7	7
<b>Jumlah</b>		<b>78</b>	<b>288</b>

*Sumber Data* : Pengolahan data Primer, 2017

Dari tabel 4.7 diatas dilihat bahwa tanggapan responden dalam proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan tanggapan responden didapatkan jumlah skor 288 dengan predikat baik.

#### **b. Partisipasi pemerintah**

Untuk mengetahui frekuensi tanggapan responden terhadap indikator partisipasi pemerintah, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.8  
**Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa  
 pemerintah peduli memajukan pembangunan kondisi  
 dahulu dengan sekarang**

<b>Kategori Jawaban</b>	<b>Skor</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Jumlah Skor</b>
Sangat Baik	5	12	60
Baik	4	28	112
Kurang Baik	3	21	63
Tidak Baik	2	14	28
Sangat Tidak Baik	1	3	3
<b>Jumlah</b>		<b>78</b>	<b>266</b>

*Sumber Data* : Pengolahan data Primer, 2017

Dari tabel 4.8 diatas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap pernyataan pemerintah peduli memajukan pembangunan kondisi dahulu dengan sekarang tanggapan responden didapatkan jumlah skor 266 dengan predikat baik.

Tabel 4.9

**Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa pemerintah distrik memberikan dukungan dalam musyawarah kampung**

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat Baik	5	10	50
Baik	4	10	40
Kurang Baik	3	32	96
Tidak Baik	2	14	28
Sangat Tidak Baik	1	12	12
<b>Jumlah</b>		<b>78</b>	<b>226</b>

*Sumber Data* : Pengolahan data Primer, 2017

Dari tabel 4.9 diatas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap pernyataan pemerintah distrik memberikan dukungan dalam musyawarah kampung tanggapan responden didapatkan jumlah skor 226 dengan predikat kurang baik.

Tabel 4.10

**Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa bagaimanakah partisipasi pemerintah kampung dalam memberi dukungan terhadap aspirasi masyarakat**

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat Baik	5	17	85
Baik	4	22	88
Kurang Baik	3	15	45
Tidak Baik	2	16	32
Sangat Tidak Baik	1	8	8
<b>Jumlah</b>		<b>78</b>	<b>258</b>

*Sumber Data* : Pengolahan data Primer, 2017

Dari tabel 4.10 diatas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap pernyataan bagaimanakah partisipasi pemerintah kampung dalam memberi dukungan terhadap aspirasi masyarakat tanggapan responden didapatkan jumlah skor 258 dengan predikat baik.

**c. Pemberdayaan masyarakat**

Untuk mengetahui frekuensi tanggapan responden terhadap indikator pemberdayaan masyarakat, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.11

**Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa pimpinan di wilayahnya mengutamakan pemberdayaan masyarakat**

<b>Kategori Jawaban</b>	<b>Skor</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Jumlah Skor</b>
Sangat Baik	5	35	175
Baik	4	19	76
Kurang Baik	3	9	27
Tidak Baik	2	7	14
Sangat Tidak Baik	1	8	8
<b>Jumlah</b>		<b>78</b>	<b>300</b>

*Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2017*

Dari tabel 4.11 diatas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap pernyataan pimpinan di wilayahnya mengutamakan pemberdayaan masyarakat tanggapan responden didapatkan jumlah skor 300 dengan predikat baik.

Tabel 4.12

**Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa masyarakat sudah sesuai mengembangkan taraf hidup**

<b>Kategori Jawaban</b>	<b>Skor</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Jumlah Skor</b>
Sangat Baik	5	12	60
Baik	4	13	52
Kurang Baik	3	28	84
Tidak Baik	2	21	42
Sangat Tidak Baik	1	4	4
<b>Jumlah</b>		<b>78</b>	<b>242</b>

*Sumber Data* : Pengolahan data Primer, 2017

Dari tabel 4.12 diatas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap masyarakat sudah sesuai mengembangkan taraf hidup tanggapan responden didapatkan jumlah skor 242 dengan predikat baik.

Tabel 4.13

**Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa tranparansi pemerintah terhadap anggaran untuk pemberdayaan masyarakat**

<b>Kategori Jawaban</b>	<b>Skor</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Jumlah Skor</b>
Sangat Baik	5	12	60
Baik	4	10	50
Kurang Baik	3	20	60
Tidak Baik	2	20	40
Sangat Tidak Baik	1	16	16
<b>Jumlah</b>		<b>78</b>	<b>226</b>

*Sumber Data* : Pengolahan data Primer, 2017

Dari tabel 4.13 diatas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap pernyataan tranparansi pemerintah terhadap anggaran untuk pemberdayaan masyarakat tanggapan responden didapatkan jumlah skor 226 dengan predikat kurang baik.

#### d. Dana Alokasi

Untuk mengetahui frekuensi tanggapan responden terhadap indikator dana alokasi, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.14

#### Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa penerapan dalam penggunaan dana

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat Baik	5	6	30
Baik	4	21	84
Kurang Baik	3	29	87
Tidak Baik	2	11	22
Sangat Tidak Baik	1	11	11
<b>Jumlah</b>		<b>78</b>	<b>234</b>

*Sumber Data* : Pengolahan data Primer, 2017

Dari tabel 4.14 diatas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap pernyataan penerapan dalam penggunaan dana tanggapan responden didapatkan jumlah skor 234 dengan predikat kurang baik.

Tabel 4.15

#### Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa ketersediaan Dana dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
Sangat Baik	5	15	75
Baik	4	27	108
Kurang Baik	3	16	48
Tidak Baik	2	16	32
Sangat Tidak Baik	1	5	5
<b>Jumlah</b>		<b>78</b>	<b>268</b>

*Sumber Data* : Pengolahan data Primer, 2017

Dari tabel 4.15 diatas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap ketersediaan Dana dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa tanggapan responden didapatkan jumlah skor 268 dengan predikat baik.

Tabel 4.16

**Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa ketersediaan Dana untuk mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat**

<b>Kategori Jawaban</b>	<b>Skor</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Jumlah Skor</b>
Sangat Baik	5	15	75
Baik	4	14	56
Kurang Baik	3	28	84
Tidak Baik	2	12	24
Sangat Tidak Baik	1	9	9
<b>Jumlah</b>		<b>78</b>	<b>248</b>

*Sumber Data* : Pengolahan data Primer, 2017

Dari tabel 4.16 diatas dilihat bahwa tanggapan responden terhadap pernyataan ketersediaan Dana untuk mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat tanggapan responden didapatkan jumlah skor 248 dengan predikat kurang baik.

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, maka pembahasannya adalah sebagai berikut :

### **1. Indikator partisipasi masyarakat**

Keikutsertaan masyarakat untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri., dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut ini :

Tabel 4.17  
**Rata-rata skor**  
**Indikator partisipasi masyarakat**

No	Uraian Tugas	Frekuensi	Jumlah Skor	predikat
1	partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kampung	78	271	Baik
2	partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dalam pelaksanaan pembangunan kampung	78	306	Baik
3	dalam proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan	78	288	Baik
<b>Rata-rata</b>		<b>78</b>	<b>288</b>	<b>Baik</b>

*Sumber Data* : Pengolahan data Primer, 2017

Berdasarkan tabel 4.18 hasil analisis tanggapan responden mengenai partisipasi masyarakat menunjukkan rata-rata skor 288 dengan predikat baik, artinya keberhasilan suatu proses pembangunan tidak dapat dilepaskan dari adanya partisipasi anggota masyarakatnya, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu yang merupakan bagi yang sangat integral yang sangat penting dalam proses dinamika pembangunan, karena secara prinsip pembangunan ditunjukkan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Oleh sebab itu tanggung jawab berhasil tidaknya pembangunan tidak saja ditangan pemerintah tetapi juga ditangan masyarakat.

## 2. Indikator partisipasi pemerintah

peran pemerintah dalam mengerakan masyarakat dan melibatkan mereka dalam meningkatkan pembangunan dengan

menyumbangkan inisiatif dan kreatifitasnya guna menunjang pembangunan yang lebih merata, dapat dilihat pada tabel 4.18 berikut ini :

Tabel 4.18  
**Rata-rata skor**  
**Indikator partisipasi pemerintah**

No	Uraian Tugas	Frekuensi	Jumlah Skor	predikat
1	pemerintah peduli memajukan pembangunan kondisi dahulu dengan sekarang	<b>78</b>	266	Baik
2	pemerintah distrik memberikan dukungan dalam musyawarah kampung	<b>78</b>	226	Kurang Baik
3	bagaimanakah partisipasi pemerintah kampung dalam memberi dukungan terhadap aspirasi masyarakat	<b>78</b>	258	Baik
<b>Rata-rata</b>		<b>78</b>	<b>250</b>	<b>Baik</b>

*Sumber Data* : Pengolahan data Primer, 2017

Berdasarkan tabel 4.19 hasil analisis tanggapan responden mengenai partisipasi pemerintah menunjukkan rata-rata skor 250 dengan predikat baik, artinya dimana pemerintah berperan aktif dalam hal pemberian ide-ide /pemikiran dalam proses pembangunan dikampung Dimba Kabupaten Lanny Jaya cukup memberikan andil yang besar. Hal ini memungkinkan tumbuhnya daya kreatif dan inovatif masyarakat dalam rangka perubahan pola fikir yang berorientasi pada pembangunan

yang sangat berguna bagi program pembangunan dimasa yang akan datang.:

### 3. Indikator pemberdayaan masyarakat

kemampuan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan usaha untuk memperbaiki kesejahteraannya, dapat dilihat pada tabel 4.19 berikut ini :

Tabel 4.19  
Rata-rata skor  
Indikator pemberdayaan masyarakat

No	Uraian Tugas	Frekuensi	Jumlah Skor	predikat
1	pimpinan di wilayahnya mengutamakan pemberdayaan masyarakat	78	300	Baik
2	masyarakat sudah sesuaikan mengembangkan taraf hidup	78	242	Baik
3	tranparansi pemerintah terhadap anggaran untuk pemberdayaan masyarakat	78	226	Kurang Baik
<b>Rata-rata</b>		<b>78</b>	<b>256</b>	<b>Baik</b>

*Sumber Data* : Pengolahan data Primer, 2017

Berdasarkan tabel 4.20 hasil analisis tanggapan responden mengenai pemberdayaan masyarakat menunjukkan rata-rata skor 256 dengan predikat baik, dimana dalam pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan peningkatan sarana/prasarana sudah diterapkan di distrik dimba guna membantu proses kemajuan desa.

#### 4. Indikator Alokasi Dana

Anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada kampung yang mana sumbernya berasal dari bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Pembangunan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten., dapat dilihat pada tabel 4.19 berikut ini :

Tabel 4.20  
Rata-rata skor  
Indikator Alokasi Dana

No	Uraian Tugas	Frekuensi	Jumlah Skor	predikat
1	penerapan dalam penggunaan dana	78	234	Kurang Baik
2	ketersedian Dana dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa	78	268	Baik
3	ketersedian Dana untuk mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat	78	248	Baik
<b>Rata-rata</b>		<b>78</b>	<b>250</b>	<b>Baik</b>

*Sumber Data* : Pengolahan data Primer, 2017

Berdasarkan tabel 4.20 hasil analisis tanggapan responden mengenai alokasi dana menunjukkan rata-rata skor 250 dengan predikat baik, artinya dimana dana yang sudah di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Desa untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat sudah berjalan sebagaimana mestinya.

Tabel 4.21  
**Rata-rata skor**  
**Factor-faktor Penghambat Pelaksanaan Pembangunan**

No	Uraian Tugas	Frekuensi	Jumlah Skor	predikat
1	Partisipasi masyarakat	78	288	Baik
2	Partisipasi pemerintahan	78	250	Baik
3	Pemberdayaan masyarakat	78	256	Baik
4	Alokasi dana	78	250	Baik
<b>Rata-rata</b>		<b>78</b>	<b>261</b>	<b>Baik</b>

*Sumber Data* : Pengolahan data Primer, 2017

Berdasarkan tabel 4.21 hasil analisis tanggapan responden mengenai variabel factor-faktor penghambat pelaksanaan pembangunan menunjukkan rata-rata skor 261 dengan predikat baik, Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan tidak hanya merupakan usaha pemerintah semata atau masyarakat saja, akan tetapi suatu kegiatan bersama yang hasilnya diharapkan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan pembangunan kampung dimba merupakan cermin dari keberhasilan pembangunan nasional, karena itu titik berat pembangunan nasional diletakkan pada pembangunan kecamatan.

Apabila pembangunan tersebut dilaksanakan diwilayah kecamatan, maka sudah jelas bahwa partisipasi masyarakat kecamatanlah yang menjadi kunci keberhasilannya. Namun demikian peran serta masyarakat dalam proses pembangunan tentunya banyak faktor yang mempengaruhi tingkat keterlibatannya dalam pembangunan, menurut hemat penulis faktor yang mempengaruhi peran serta

masyarakat dalam pembangunan di Kampung Dimba adalah faktor intern yang meliputi kesadaran, pendidikan dan penghasilan / pendapatan. Sedangkan faktor ekstern meliputi kepemimpinan pemerintah dan peralatan / fasilitas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pembangunan di kampung Dimba Kabupaten Lanny Jaya dimana partisipasi masyarakat dan pemerintah sangatlah penting guna membantu tercapainya pelaksanaan program pembangunan, sehingga akan timbul satu program dari prakarsa dan swadaya serta gotong royong dari masyarakat. Atas dasar inilah kesadaran dari masyarakat perlu terus di tumbuhkan dan ditingkatkan sehingga nantinya partisipasinya akan dirasakan sehingga suatu kewajiban yang lahir secara spontan.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pembangunan dikampung adalah:

##### **a. Faktor ekonomi**

Lapisan masyarakat setempat lebih mementingkan kebutuhan sehari-hari. Pada umumnya sebagian besar masyarakat memiliki mata pencharian bertani, dengan bertani mereka merasa kebutuhan masih belum mencukupi sehingga, masyarakat menilai bahwa pembangunan merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah.

##### **b. Pendidikan yang relatif rendah**

Dengan adanya tingkat pendidikan yang relatif rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keahlian dan keterampilan tertentu sehingga, seseorang kurang memahami permasalahan yang dihadapi.

## **B. Saran - Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

- a. masyarakat kampung diberikan kesempatan memilih dan memutuskan apa yang dikehendaknya baik diantara alternatif pemerintah maupun dari alternatif masyarakat itu sendiri.
- b. Disarankan hendaknya aparat pemerintah khususnya perangkat Desa dapat meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan pendidikan formal dan informal serta perlu mengikuti berbagai kegiatan pendidikan dan latihan dalam membuka wawasan bagi aparat pemerintah Desa dalam kaitan dengan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
- c. Masyarakat harus turut andil dalam berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan agar masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan akses kesejahteraan dan kemampuan kultur.
- d. Pemberian alokasi dana desa (ADD) agar dapat di alokasikan sesuai dengan anggaran yang sudah di keluarkan yang merupakan wujud dari pemenuhan hak kampung untuk menyelenggarakan otonomi kampung agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Kampung itu sendiri.

## Lampiran 1.

### IDENTITAS RESPONDEN :

1. Nomor Responden : .....
2. Jenis Kelamin : .....
3. Umur : .....
4. pekerjaan : .....

### I. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Dengan mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/i mengisi kuisisioner berikut ini dengan pada salah satu alternatif jawaban yang ada berdasarkan dengan penilaian Bapak/Ibu/Sdr/i selama bertugas tentang Faktor-faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Pembangunan Distrik Dimba Kabupaten Lanny Jaya.

### II. Variabel Pembangunan

#### A. Indikator Partisipasi Masyarakat

1. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kampung?
  - a. Sangat Baik
  - b. Baik
  - c. Kurang Baik
  - d. Tidak Baik
  - e. Sangat Tidak Baik
2. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dalam pelaksanaan pembangunan kampung?
  - a. Sangat Baik
  - b. Baik
  - c. Kurang Baik
  - d. Tidak Baik
  - e. Sangat Tidak Baik
3. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i bagaimanakah dalam proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan ?
  - a. Sangat Baik
  - b. Baik
  - c. Kurang Baik

- d. Tidak Baik
- e. Sangat Tidak Baik

B. Indikator Partisipasi Pemerintah

- 4. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i apakah pemerintah peduli memajukan pembangunan kondisi dahulu dengan sekarang ?
  - a. Sangat Baik
  - b. Baik
  - c. Kurang Baik
  - d. Tidak Baik
  - e. Sangat Tidak Baik
- 5. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i pemerintah distrik memberikan dukungan dalam musyawarah kampung?
  - a. Sangat Baik
  - b. Baik
  - c. Kurang Baik
  - d. Tidak Baik
  - e. Sangat Tidak Baik
- 6. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i bagaimanakah partisipasi pemerintah kampung dalam memberi dukungan terhadap aspirasi masyarakat?
  - a. Sangat Baik
  - b. Baik
  - c. Kurang Baik
  - d. Tidak Baik
  - e. Sangat Tidak Baik

b. Indikator Pemberdayaan

- 7. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i apakah pimpinan di wilayahnya mengutamakan pemberdayaan masyarakat?
  - a. Sangat Baik
  - b. Baik
  - c. Kurang Baik
  - d. Tidak Baik
  - e. Sangat Tidak Baik

8. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i apakah masyarakat sudah sesuaikan mengembangkan taraf hidup?
  - a. Sangat Baik
  - b. Baik
  - c. Kurang Baik
  - d. Tidak Baik
  - e. Sangat Tidak Baik
9. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i bagaimana tranparansi pemerintah terhadap anggaran untuk pemberdayaan masyarakat?
  - a. Sangat Baik
  - b. Baik
  - c. Kurang Baik
  - d. Tidak Baik
  - e. Sangat Tidak Baik

#### D.Indikator Alokasi Dana

10. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i bagaimana penerapan dalam penggunaan dana?
  - a. Sangat Baik
  - b. Baik
  - c. Kurang Baik
  - d. Tidak Baik
  - e. Sangat Tidak Baik
11. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i bagaimanakah ketersediaan Dana dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa?
  - a. Sangat Baik
  - b. Baik
  - c. Kurang Baik
  - d. Tidak Baik
  - e. Sangat Tidak Baik
12. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/I bagaimanakah ketersediaan Dana untuk mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat ?
  - a. Sangat Baik
  - b. Baik
  - c. Kurang Baik
  - d. Tidak Baik
  - e. Sangat Tidak Baik

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solikin, 1994, *Kebijakan Publik dan Pembangunan*, FIA UNIBRAW Malang.
- Affifuddin, S.Ag., M.Si, 2010, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Alfabeta, Bandung.
- Baratha, 1999, *Sosiologi Pembangunan Desa*, PPIS UNIBRAW Malang.
- Bryant Dan White 1987, *Managing Development In The Wold*. Westview Boulder,Colorado.
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indoensia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Fadillah, Putra dan Saiful Ariff, 2001, *Kapitalisme Birokrasi*, LkiS, Yogyakarta.
- Harry, R. Hikmat, Dr., M.Si 2004, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Humaniora Utama press, Bandung.
- Hagul, Peter, 1992, *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Jhon Clark, 1995, *Pembangunan Demokrasi*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Juniarso, Ridwan, Dr. Ir. H. dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009 *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, PT. Nuansa, Bandung.
- Kansil, C.S.T, 1991, *Pokok – Pokok Pemerintah di Daerah*, Aksara, Jakarta.
- Kartasmita, Ginanjar. 1997. *Pembangunan Untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan)*. Jakarta: CIDEAS.
- Lupiyoadi, 2001, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*, CV Cita Utama, Jakarta
- Mardjono, 1988, *Pembangunan Desa*, Yayasan Obor. Jakarta.
- Nugroho, dan Dahuri. 2004. *Manajemen Pembangunan Indonesia: Sebuah Pengantar Panduan*. Jakarta: Elekx Media Komputindo.

- Riyadi & Dedy Supriyady Bratakusumah (2004) *Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi Menggali Potensi dalam mewujudkan otonomi daerah*, PT Gramedia Pustaka utama Jakarta.
- Siagian, S.P. Sondang, 1982, *Administrasi Pembangunan*, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Simanjuntak L.B, 1985, *Sosiologi Pembangunan*, Pt Gramedia Jakarta.
- Soewigjo, 1985, *Aministrasi Pembangunan Desa dan Sumber – Sumber Pendapatan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono, Prof. DR. 2009, *Metode Penelitian Administrasi*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Sudjana, 1996, *Metoda Statistika*, Tarsito, Bandung
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1995, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3S, Jakarta.
- T. Hani Handoko, 1998, *Sumberdaya Manusia Dalam Pembangunan Nasional*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Walter A. Friedlander, 1961, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Alfabeta, Bandung.

### **Dokumen-dokumen**

- UU No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- Desa UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Perda Kabupaten Lanny Jaya No. 5 Tahun 2010 Tentang Desa.

/Lampiran 2 : Data Hasil Penelitian

**DATA HASIL PENELITIAN**  
**FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PELAKSANAAN**  
**PEMBANGUNAN KAMPUNG DIMBA DISTRIK DIMBA**  
**KABUPATEN LANNY JAYA**

No Rsp	Indikator dan Nomor Item Pertanyaan														
	Partisipasi Masyarakat														
	1					2					3				
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e
1	√							√					√		√
2		√				√							√		
3		√					√						√		
4	√						√						√		
5	√					√					√				
6	√					√					√				
7	√						√								√
8					√		√					√			
9					√		√								√
10				√			√					√			
11				√			√								√
12				√					√			√			
13	√					√					√				
14	√					√					√				
15			√							√		√			

16		√							√					√
17			√			√				√				
18			√			√				√				
19				√				√				√		
20	√					√				√				
21					√		√					√		
22			√				√					√		
23					√			√				√		
24	√					√				√				
25	√						√				√			
26	√						√					√		
27	√					√				√				
28	√					√				√				
29			√					√						
30	√					√				√				
31		√						√				√		
32			√					√		√				
33	√					√				√				
34			√				√				√			
35		√					√				√			
36	√					√				√				
37			√				√				√			
38		√					√				√			
39		√					√				√			
40			√				√						√	

41				√			√					√			
42			√			√						√			
43				√		√						√			
44				√		√								√	
45			√			√							√		
46			√			√							√		
47				√		√							√		
48				√		√							√		
49			√			√							√		
50			√							√				√	
51			√				√							√	
52			√				√						√		
53	√					√							√		
54			√					√						√	
55			√					√						√	
56			√				√							√	
57	√					√							√		
58	√					√							√		
59	√					√								√	
60	√					√								√	
61	√					√							√		
62	√					√							√		
63				√					√				√		
64					√	√						√			

65				√			√							√	
66				√					√					√	
67	√					√					√				
68			√						√			√			
69	√					√					√				
70		√							√					√	
71				√					√			√			
72				√		√					√				
73				√			√							√	
74					√		√							√	
75	√					√					√				
76		√					√								√
77		√						√							√
78	√					√					√				
<b>Skor</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>35</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>29</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>7</b>

No Rsp	Indikator dan Nomor Item Pertanyaan		
	Partisipasi Masyarakat		
	1	2	3

	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e
1	√		√				√					√			
2			√			√							√		
3			√				√							√	
4			√				√				√				
5			√			√					√				
6		√					√							√	
7			√				√							√	
8	√					√						√			
9			√			√					√				
10			√			√						√			
11	√								√				√		
12			√						√			√			
13		√						√					√		
14		√						√					√		
15	√								√			√			
16	√								√		√				
17		√						√			√				
18		√						√					√		
19			√						√		√				
20		√						√					√		
21				√					√		√				
22				√		√					√				
23				√		√					√				
24		√						√			√				

25				√			√				√	√			
26				√		√					√				
27		√						√			√				
28		√						√			√				
29			√						√		√				
30		√						√			√				
31			√						√		√				
32			√							√		√			
33		√						√					√		
34				√						√		√			
35				√						√		√			
36		√						√					√		
37			√							√		√			
38				√						√		√			
39				√						√		√			
40			√							√	√				
41			√							√		√			
42		√						√					√		
43		√						√					√		
44			√					√					√		
45	√							√				√			
46	√							√				√			
47		√						√						√	
48		√						√							√
49		√						√					√		

50	√								√					√
51	√								√				√	
52	√								√			√		
53		√						√				√		
54				√					√			√		
55				√					√				√	
56			√						√					√
57		√						√						√
58		√						√				√		
59				√				√				√		
60				√				√				√		
61		√						√					√	
62		√						√					√	
63				√					√			√		
64		√						√					√	
65	√						√						√	
66	√					√							√	
67		√						√					√	
68	√		√						√			√		
69	√	√						√						√
70	√				√		√							√
71					√		√					√		
72		√						√					√	
73			√				√						√	
74			√			√							√	

75		√						√					√		
76			√							√			√		
77					√					√				√	
78		√						√							√
<b>Skor</b>	<b>12</b>	<b>28</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>32</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>8</b>

No Rsp	<b>Indikator dan Nomor Item Pertanyaan</b>														
	<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>														
	<b>1</b>					<b>2</b>					<b>3</b>				
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e
1				√						√			√		
2			√							√					√
3			√				√								√
4	√						√						√		

5	√							√			√		
6	√							√		√			
7			√				√			√			
8			√				√				√		
9			√					√			√		
10			√					√				√	
11			√			√							√
12			√			√						√	
13	√					√				√			
14	√								√	√			
15		√							√			√	
16		√							√			√	
17	√							√				√	
18	√							√					√
19		√				√						√	
20	√					√		√					√
21		√				√						√	
22		√				√						√	
23		√				√						√	
24	√							√				√	
25		√							√			√	√
26		√							√			√	
27	√							√					√
28	√							√				√	
29		√							√			√	

30	√							√					√		
31		√			√				√				√		
32					√				√					√	
33	√							√			√				
34					√				√					√	
35					√				√					√	
36	√							√							
37			√				√							√	
38					√		√							√	
39					√		√							√	
40					√		√						√		
41					√	√								√	
42	√							√			√				
43	√							√			√				
44	√					√					√				
45	√					√								√	
46	√					√								√	
47	√							√							√
48	√							√					√		
49	√							√					√		
50		√							√				√		
51		√							√						
52		√							√					√	
53	√							√							
54		√							√					√	

55		√					√					√			
56		√					√					√			
57	√							√				√			
58	√							√							√
59	√								√					√	
60	√								√					√	
61	√							√							√
62	√							√							√
63									√					√	
64	√							√							√
65		√							√			√			
66		√							√			√			
67	√							√				√			
68		√												√	
69	√							√							√
70				√			√					√			
71				√			√							√	
72	√							√				√			
73				√			√					√			
74				√			√					√			
75	√							√			√				
76				√						√	√				
77				√						√	√				
78	√							√			√				
<b>Skor</b>	<b>35</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>16</b>

No Rsp	<u>Indikator dan Nomor Item Pertanyaan</u>														
	Alokasi Dana														
	1					2					3				
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e
1		√						√			√				
2		√						√			√				
3		√						√			√				
4		√						√			√				
5		√							√						
6			√						√					√	
7		√						√						√	
8	√								√		√				
9		√							√		√				

10		√						√		√				
11				√				√					√	
12		√					√						√	
13			√				√						√	
14			√				√						√	
15	√						√				√			
16	√						√				√			
17			√				√				√			
18			√				√				√			
19		√					√						√	
20			√				√						√	
21				√				√					√	
22				√				√				√		
23	√						√					√		
24			√				√					√		
25	√						√							
26	√						√					√		
27			√				√					√		
28			√				√						√	
29		√					√						√	
30			√				√						√	
31		√				√							√	
32		√				√					√			
33			√											√
34				√				√					√	

35			√				√					√		
36			√				√					√		
37		√					√					√		
38				√				√				√		
39				√				√				√		
40		√				√						√		
41		√				√						√		
42			√			√							√	
43			√			√							√	
44		√				√							√	
45				√				√					√	
46				√				√					√	
47			√				√			√				
48			√				√						√	
49			√				√						√	
50				√				√			√			
51				√				√			√			
52					√				√		√			
53			√										√	
54					√				√				√	
55					√				√					√
56		√								√				√
57			√							√				√
58			√				√					√		
59					√				√			√		

60					√				√			√			
61			√			√						√			
62			√							√		√			
63					√				√				√		
64			√										√		
65					√				√						√
66					√				√						√
67			√			√									√
68		√								√			√		
69			√							√			√		
70					√				√						√
71					√				√				√		
72			√			√									√
73		√				√							√		
74		√				√									√
75					√				√					√	
76		√				√								√	
77					√				√					√	
78			√			√								√	
<b>Skor</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>29</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>9</b>

**BIODATA PENULIS :**

**TINDIEN KOGOYA**, Dilahirkan di Jirene pada tanggal 9 Februari 1991, dari pasangan Bapak Tionius Kogoya dan Ibu Dertina Yigibalom, anak kedua dari lima bersaudara. Tamat SDN YPPGI Nokapaka pada tahun 2005, tamat SMP YPPGI Tiom Lulus Tahun 2008, tamat SMA Negeri 1 Tiom Lulus Pada tahun 2011. Pada tahun 2011 terdaftar sebagai Masiswa Program Studi Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Amal Ilmiah Yapis Wamena tahun akademik 2011/2012.